

Presiden Minta Penyelesaian Rempang Kedepankan Kepentingan Masyarakat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta penyelesaian masalah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau dilakukan secara kekeluargaan dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9), sebagaimana diungkapkan Menteri Investasi Bahilil Lahadalia.

"Tadi bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," kata Menteri Investasi Bahilil Lahadalia.

Bahilil mengaku diberikan tugas khusus oleh Presiden untuk menyelesaikan persoalan di Rempang dengan baik dan melibatkan kementerian lain. Dia melaporkan kepada Kepala Negara bahwa dari 17.000 hektare area Pulau Rempang,

hanya 7.000-8.000 hektare yang bisa dikelola, sedangkan selebihnya adalah hutan lindung. "Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," jelas Bahilil.

Dia mengungkapkan dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Rempang beberapa hari lalu, dirinya telah menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Rempang bukan pengusuran atau relokasi, melainkan penggeseran. "Bukan pengusuran, sekali lagi. Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah penggeseran. Kalau relokasi, dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung

yang masih ada di Rempang," tuturnya.

Selain itu, menurut Bahilil, masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan. Menurut Bahilil, sebagian masyarakat di Rempang secara turun-temurun sebagian belum mempunyai dokumen alas hak. "Dan dengan pergeseran ini, kita berikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah kita kasih dengan tipe 45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga 120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP nilainya berapa, itu yang akan dibagikan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, selama masa menunggu rumah, masyarakat juga akan diberikan uang tunggu senilai Rp 1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah senilai Rp 1.200.000 per kepala keluarga. "Kemudian dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman, ada kerambah, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku



ANTARA/Rangga Pandu Asmara, Jingga/pti
Menteri Investasi Bahilil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9/2023).

oleh BP Batam," kata dia.

Lebih jauh dia menyampaikan ada lima kampung di Rempang yang mengalami penggeseran yakni di Blongkeng, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Pasir Merah dan Simpulan Hulu. Pemerintah akan menggeser masyarakat ke lokasi di Tanjung Banun yang jaraknya tidak lebih dari 3 kilometer dari lokasi awal dan akan menjadi kampung percontohan. "Akan kita tata betul

baik dari sisi infrastruktur jalannya, maupun dari sisi puskesmas. Kemudian air bersih, kemudian sekolah, kita akan buat sedemikian baik termasuk di dalamnya adalah pelabuhan perikanan," kata dia.

Menurut Bahilil, sejauh ini terdapat 900 kepala keluarga yang terdaftar, dan hampir 300 kepala keluarga di antaranya sudah melakukan pendaftaran secara sukarela untuk digeser. (ANTARA)

PERCEPATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PSN

Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) agar dapat selesai dalam kurun waktu kurang lebih setahun, sesuai dengan target yang telah ditentukan.

UPAYA PERCEPATAN PEMERINTAH

- Memberikan jaminan keuangan untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko.
- Mengintensifkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan meninjau langsung ke lapangan.
- Mempermudah perizinan usaha bagi investor PSN.
- Memperjelas proses perizinan tata ruang dan pengadaan lahan untuk PSN.
- Memberikan bantuan pembiayaan non APBN, seperti hak pengelolaan terbatas dan pemanfaatan peningkatan nilai tanah.

DAMPAK POSITIF PEMBANGUNAN PSN

- Total nilai investasi mencapai Rp1.134,9 triliun.
- Membantu menaikkan nilai indeks daya saing Indonesia ke peringkat 34 pada 2023 dari 44 pada 2022.
- Menyerap hingga 11 juta orang tenaga kerja.

“PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat. Saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan.”

Presiden Joko Widodo

HOTLINE ANTARA 0812-8825-9462

Dispar DIY Siapkan Paket Wisata Sumbu Filosofi

YOGYAKARTA - Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berencana membuat paket wisata Sumbu Filosofi Yogyakarta setelah kawasan itu resmi ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO beberapa waktu lalu.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Kurniawan saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (25/9), menuturkan paket wisata itu akan mengeksplorasi potensi wisata mulai dari Panggung Krapyak, Keraton, hingga Tugu Yogyakarta dengan konsep ramah lingkungan. "Nanti mau jalan kaki setengah dari Sumbu Filosofi bisa atau mau sampai ujung Tugu juga menarik, atau pakai sepeda lebih menarik. Saya kira paket ramah lingkungan lebih menarik," ujar dia.

Selain berjalan kaki atau menaiki sepeda, wisatawan juga memungkinkan menggunakan bus listrik manakala sudah disiapkan. Dalam paket itu, Kurniawan menerangkan wisatawan rencananya akan diajak berjalan kaki atau bersepeda sembari menikmati dan mempelajari sejarah dan budaya yang ada di sepanjang kawasan warisan dunia itu.

Selain ramah lingkungan, menurut dia, berjalan kaki atau bersepeda membuat wisatawan lebih mampu mendalami makna dan merasakan suasana Sumbu Filosofi. "Jadi bisa sekaligus 'sport tourism', sambil jalan

kaki dijelaskan kemudian di titik tertentu istirahat, misalnya di Ketandan mungkin bisa minum teh, lalu jalan lagi. Itu akan bagus, banyak yang minat karena lebih bisa menikmati," kata dia.

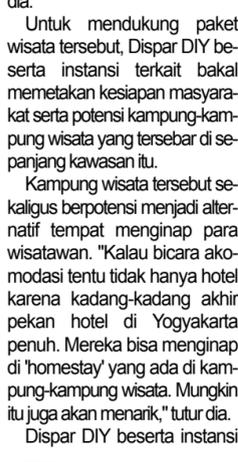
Untuk mendukung paket wisata tersebut, Dispar DIY beserta instansi terkait bakal memetakan kesiapan masyarakat serta potensi kampung-kampung wisata yang tersebar di sepanjang kawasan itu.

Kampung wisata tersebut sekaligus berpotensi menjadi alternatif tempat menginap para wisatawan. "Kalau bicara akomodasi tentu tidak hanya hotel karena kadang-kadang akhir pekan hotel di Yogyakarta penuh. Mereka bisa menginap di 'homestay' yang ada di kampung-kampung wisata. Mungkin itu juga akan menarik," tutur dia.

Dispar DIY beserta instansi

terkait bakal mempertimbangkan destinasi mana saja yang layak masuk dalam paket wisata Sumbu Filosofi itu. Menurut dia, banyak aktivitas sosial, budaya, serta aktivitas ekonomi yang bisa dikelola dalam paket itu. "Dengan Sumbu Filosofi ada narasi yang bisa kita perkuat sehingga bisa jadi 'edu tourism' bukan hanya sekadar wisata bersenang-senang," ujar dia.

Lebih dari itu, beragam atraksi seni dan budaya bakal ditampilkan di sepanjang kawasan itu secara terjadwal setelah melalui proses seleksi dan kurasi dengan standar yang nantinya disepakati bersama. "Kami akan meningkatkan daya tarik di Sepanjang Sumbu Filosofi sehingga ada khas yang menunjukkan bahwa sumbu Filosofi betul-betul warisan dunia," kata dia. (ANTARA)



ANTARA FOTO/Hendra Nurdiansyah/Iwa

Pengendara melintas di dekat Keraton Yogyakarta, DI Yogyakarta, Selasa (19/9/2023). UNESCO menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadi warisan dunia.



ANTARA FOTO/Dhema Revianto/YU/iam

Porang, Komoditas Andalan Masa Depan

PORANG atau dalam bahasa latin disebut Amorphophallus muelleri blume merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak manfaat dan keunggulan. Selain rendah kalori dan juga bebas gula, porang bisa diolah menjadi berbagai bahan makanan hingga bahan kosmetik.

Komoditas ini merupakan produk yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah. Bahkan Presiden Joko Widodo meyakini bahwa porang akan menjadi makanan sehat di masa mendatang mengingat porang memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Selain itu, budi daya porang juga sebagai terobosan inovatif untuk tingkatkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.

"Saya tadi sudah menyampaikan kepada Menteri Pertanian untuk betul-betul kita seriusi komoditas baru ini komoditas porang," ujar presiden saat meresmikan pabrik pengolahan porang di Madiun beberapa waktu lalu.

Kepala negara juga berharap komoditas porang ini dapat ekspor tidak hanya dalam bentuk mentahan dan barang setengah jadi, namun sudah dalam bentuk beras atau tepung porang. Porang ju-

ga memberikan nilai tambah yang baik, tidak hanya bagi perusahaan pengolah porang tetapi juga kepada para petani.

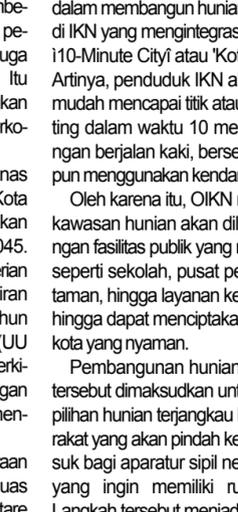
Selain ke China, Indonesia juga mengeksplor olahan porang ke Taiwan, Jepang, Makau, Italia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura dan Australia.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan beberapa daerah lainnya dengan estimasi total luasan 47.641 hektare.

Data dari kementerian Perindustrian menyebutkan pemerintah menargetkan pada tahun 2024 produksi umbi porang akan mencapai 600.000 ton dari luas lahan sebesar 100.000 hektare.

Saat ini, terdapat 13 perusahaan yang menghasilkan chip porang dengan total produksi 22.833 ton per tahun, dan 6 industri pengolah porang yang mampu memproduksi tepung glukomanan dengan total produksi 1.180 ton per tahun.***

Foto dan teks: Adeng Bustomi, Ahmad Subaidi, Anis Efizudin, Aribowo Sucipto, Siswoidodo, Zabur Karuru.



ANTARA FOTO/Dhema Revianto/YU/iam

Menengok Hunian Berimbang di Ibu Kota Nusantara

DI antara ribuan pulau yang membentang di seluruh wilayah Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN) belakangan ini kian bersinar bak berlian dalam peta Indonesia. Di kota baru yang sedang dikembangkan tersebut, terdapat sebuah lagu yang terus berkumandang di antara masifnya pembangunan gedung dan hiruk pikuk jalan raya, yakni irama hunian masa depan.

Dalam cakrawala IKN, keseimbangan menjadi elemen utama. Pembangunan kota yang terencana dengan baik menyesuaikan pertumbuhan industri dan kebutuhan penduduknya. Keseimbangan itu memberikan jaminan bahwa tidak hanya pekerjaan yang berkembang, tetapi juga perumahan yang berkualitas. Itu adalah tempat yang menghubungkan ketenangan dengan kehidupan perkotaan yang dinamis.

Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada tahun 2045. Berdasarkan keterangan Kementerian PPN/Bappenas sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), populasi IKN pada 2045 diperkirakan sekitar 1,7-1,9 juta jiwa, dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare.

Angka 1,7-1,9 juta adalah perkiraan jumlah penduduk di IKN dengan luas wilayah kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pun mengambil langkah menciptakan dan mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana. Pola pembangunan yang diadopsi, yaitu pembangunan satu rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana, atau 1:2:3.

Deputi bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan langkah revolusioner diambil dalam membangun hunian berimbang di IKN yang mengintegrasikan konsep 110-Minute City atau 'Kota 10 Menit'. Artinya, penduduk IKN akan dengan mudah mencapai titik atau lokasi penting dalam waktu 10 menit, baik dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun menggunakan kendaraan.

Oleh karena itu, OIKN memastikan kawasan hunian akan dilengkapi dengan fasilitas publik yang mendukung, seperti sekolah, pusat pembelajaran, taman, hingga layanan kesehatan sehingga dapat menciptakan ekosistem kota yang nyaman.

Pembangunan hunian berimbang tersebut dimaksudkan untuk memberi pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat yang akan pindah ke IKN, termasuk bagi aparaturnya sipil negara (ASN) yang ingin memiliki rumah milik. Langkah tersebut menjadi bagian dari

upaya OIKN menciptakan kawasan yang inklusif dan ramah masyarakat dengan memberikan pilihan hunian yang nyaman dan terjangkau.

Payung hukum

Dalam menciptakan hunian berimbang di IKN, dasar hukum menjadi salah satu faktor utama yang akan mendukung kelancaran pembangunannya, seperti keberadaan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang IKN yang berisi aturan terkait. "Dalam revisi UU diatur bahwa kewajiban pengembang perumahan yang tertunda dalam melaksanakan perat-

uran pola hunian berimbang bisa dilakukan di IKN. Dengan demikian dapat menambah stok hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono.

Tertulis pula mengenai aturan pola hunian yang diwajibkan bagi para pengembang dengan pola berimbang, yakni saat membangun satu rumah mewah, maka dalam satu kawasan yang sama juga wajib membangun dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu pokok urgensi dalam Rancangan



ANTARA FOTO/Dhema Revianto/YU/iam

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menekan tombol didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Regional Asia Oceania FIFA Sanjeevan C Balasingam, Ketua PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat Grandbreaking National Training Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023).

Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang IKN adalah mengenai pengaturan khusus untuk pengembang investor perumahan.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan hunian, melakukan penataan permukiman atau perumahan di IKN, serta memberikan pengaturan untuk pengalihan kewajiban hunian berimbang. "Tentu kaitannya dengan perumahan ini pasti menjadi esensial karena di mana pun rumah itu menjadi satu sarana yang sangat penting, apalagi terdapat masyarakat lokal sehingga dalam konteks di delineasi wilayah IKN itu bagaimana kita menata kembali," ujar Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan OIKN Dian Sadiawati.

OIKN belajar dari pengalaman DKI Jakarta yang mengalami kepadatan dan perekonomiannya terkonsentrasi di kota besar tersebut. Adapun penambahan ketentuan yang akan dimasukkan ke revisi UU IKN terkait perumahan, antara lain, pemberian kesempatan bagi pengembang untuk mengalihkan kewajiban hunian berimbang dari luar IKN ke dalam wilayah IKN melalui pemberian insentif.

Kemudian pelaksanaan hunian berimbang dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang IKN, serta tambahan ketentuan lainnya adalah pembangunan dana konvensi adalah berimbang bagi percepatan pemba-